



AKUNTANSI PAJAK DEWANTARA

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA



JURNAL.USTJOGJA.AC.ID

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEANDALAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Sri Ayem^{1*}
Medi Nuryanto²

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi
Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa

*email: Sriayemfeust@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the effect of the influence of organizational commitment, the application of accrual-based government accounting standards, and the use of information technology on the reliability of local government financial reports with the internal control system as a moderating variable. This type of study is quantitative study. Data collection is done directly by using questionnaire. The population in this study were employees of the accounting/finance department at each agency at 25 SKPD in Sleman Regency. Sampling method with purposive sampling technique. The sample in this study is structural officials, accounting/finance staff who have at least one year of work experience in each agency at 25 SKPD in Sleman Regency, with a sample size of 70. Data analysis techniques in this study used multiple linear regression techniques and moderating regression analysis with the help of SPSS (Statistic Package for Social Science) program version 16.0. The regression test results show that organizational commitment and the application of accrual-based accounting standards have a significant effect on the reliability of local government financial statements. While the use of information technology does not affect the reliability of local government financial reports. The results of the moderation regression analysis show that the internal control system is able to moderate the relationship between organizational commitment to the reliability of local government financial statements, but is not able to moderate the relationship between the application of accrual-based accounting standards and the use of information technology on the reliability of local government financial reports.

INFO ARTIKEL

Diterima: 2020-08-10
Direview: 2020-08-24
Disetujui: 2020-11-18
Terbit: 2021-01-26

Keyword:

The reliability of local government financial; organizational commitment; the application of accrual-based government accounting standards; the use of information technology

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dan ekonomi di setiap Negara membutuhkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Pemerintahan yang baik merupakan bentuk keberhasilan pemerintah dalam menjalankan tugas untuk membangun negara sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. *Good governance* harus dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan yang baik yaitu transparansi dan akuntabilitas. Tranparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan diwujudkan melalui penyampaian laporan keuangan pemerintah yang telah memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Tuntutan dilaksanakannya akuntabilitas publik mengharuskan pemerintah daerah memperbaiki sistem pencatatan dan pelaporan keuangan daerah agar informasi yang diperoleh andal, mengingat bahwa keterandalan merupakan salah satu unsur penting dalam nilai informasi yang berkaitan dengan pengambilan keputusan berbagai pihak yang bersangkutan (Komarasari, 2016). Keandalan dan *timeliness* informasi laporan keuangan adalah wujud dari pertanggungjawaban pengelolaan keuangan publik yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Keandalan dan *timeliness* merupakan dua unsur dari nilai informasi yang penting terkait dengan pengambilan keputusan berbagai pihak.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, keterandalan pelaporan keuangan merupakan informasi dalam laporan keuangan yang bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi yang disajikan mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 informasi laporan keuangan dikatakan berkualitas dan bermanfaat apabila informasi yang dihasilkan dapat mendukung pengambilan keputusan dan mudah dipahami oleh para pemakai. Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Apabila informasi yang terkandung dalam laporan keuangan kurang/tidak sesuai dengan kriteria nilai informasi yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan maka dapat menimbulkan permasalahan (Latifah, 2017).

Secara umum, banyak faktor yang mempengaruhi keterandalan laporan keuangan daerah. Untuk meningkatkan keterandalan laporan keuangan daerah terdapat beberapa faktor yang menentukan, diantaranya adalah komitmen organisasi, penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal akuntansi.

Menurut (Dodopo, 2015) komitmen yang kuat dalam organisasi dapat menciptakan keyakinan dan dukungan serta loyalitas dari pegawai terhadap nilai dan sasaran yang ingin dicapai organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen organisasi sangat penting dalam organisasi, karena memiliki hubungan yang erat dengan kinerja pegawai, di mana setiap pegawai dituntut untuk memiliki kinerja yang baik dalam pekerjaannya.

Standar Akuntansi Pemerintahan menurut (Mardiasmo, 2018) yaitu pedoman atau prinsip-prinsip yang mengatur tentang perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan kepada para pengguna laporan keuangan. Penerapan akuntansi berbasis akrual diperlukan untuk menghasilkan pengukuran kinerja yang lebih baik, serta untuk memfasilitasi manajemen keuangan/aset yang lebih transparan dan akuntabel. Kesuksesan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual sangat diperlukan sehingga pemerintah dapat memiliki tata kelola keuangan yang baik dan menghasilkan informasi yang andal dan berkualitas.

Pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik. Selain itu dengan menggunakan teknologi informasi salah satunya komputer dalam menghitung dan menyusun laporan keuangan akan lebih cepat, akurat dan konsisten dari pada menggunakan sistem manual (Komarasari, 2016).

Dalam penyusunan laporan keuangan tentu saja sering terjadi kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, oleh karena itu untuk meyakinkan *stakeholder* maupun publik mengenai keakuratan laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah daerah dibutuhkan sistem pengendalian internal yang optimal. Pembuatan sistem pengendalian internal tidak dimaksudkan untuk meniadakan

semua peluang terjadinya kesalahan atau penyelewengan, akan tetapi dengan adanya sistem pengendalian internal yang baik dapat menekan terjadinya kesalahan dan penyelewengan dalam batas-batas yang dapat dianggap layak, serta seandainya hal tersebut terjadi maka akan segera cepat untuk diketahui dan diatasi (Komarasari, 2016).

Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) seluruh Indonesia menunjukkan masih banyak pemerintah daerah yang belum memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Untuk tahun pelaporan 2015, BPK mencatat hanya 58% atau 312 LKPD yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sementara itu LKPD lainnya tercatat memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) sebanyak 187 LKPD, Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) sebanyak 30 LKPD, dan masih ada 4 LKPD yang memperoleh opini Tidak Wajar (TW). Namun secara keseluruhan pengelolaan keuangan daerah semakin baik setiap tahun, hal ini ditandai dengan terus meningkatnya persentase opini WTP, penurunan WDP dan TMP. Dibandingkan dengan tahun 2014, LKPD yang mendapat opini WTP mengalami kenaikan dari 47% menjadi 58%. Kenaikan kualitas ini didukung oleh upaya pemerintah daerah memperbaiki kelemahan yang terjadi sepanjang tahun 2014 (Kalumata, 2014).

Hal tersebut menggambarkan adanya perbaikan yang dicapai oleh entitas pemerintah daerah dalam menyajikan suatu laporan keuangan yang wajar sesuai dengan prinsip yang berlaku. Hasil evaluasi BPK menunjukkan bahwa LKPD yang memperoleh opini WTP dan WDP pada umumnya memiliki pengendalian internal yang telah memadai. Adapun LKPD yang memperoleh opini TW dan TMP memerlukan perbaikan pengendalian internal (Kalumata, 2014).

Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Pemerintahan Kabupaten Sleman pada tahun 2017 menunjukkan bahwa Kabupaten Sleman mampu mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 6 kali berturut-turut dan penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) selalu tepat waktu (Harianmerapi.com, 2018). Berdasarkan hal tersebut membuat peneliti tertarik untuk meneliti apa saja yang membuat Kabupaten Sleman mampu mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 6 kali berturut-turut.

Penelitian sebelumnya oleh (Inapty, 2016) meneliti tentang pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, kompetensi aparatur, dan peran audit internal terhadap kualitas informasi laporan keuangan dengan sistem pengendalian *intern* sebagai variabel *moderating* menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah, kompetensi aparatur, peran audit internal, dan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Sedangkan penelitian sebelumnya oleh (Pratama, 2017) meneliti tentang pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, dan peran audit internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan variabel moderasi sistem pengendalian internal pemerintah menyatakan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan peran audit internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan dimoderasi sistem pengendalian internal pemerintah, sedangkan kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan dimoderasi sistem pengendalian internal pemerintah. Berdasarkan perbedaan hasil penelitian tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti kembali sistem pengendalian internal sebagai variabel moderasi terhadap keandalan laporan keuangan pemerintah daerah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada variabel komitmen organisasi dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap keandalan laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan hal-hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah dengan judul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keandalan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Sistem Pengendalian Internal Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman)”.

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan mengadopsi pendapat Jensen, 1976 dalam (Situmorang, 2016) yang menggambarkan bahwa hubungan rakyat dengan pemerintah dapat disebut sebagai hubungan keagenan yaitu hubungan yang timbul karena adanya kontrak yang ditetapkan oleh rakyat sebagai *principal* yang menggunakan pemerintah sebagai *agent* untuk menyediakan jasa yang menjadi

kepentingan rakyat. Teori keagenan pada dasarnya merupakan teori yang muncul karena adanya konflik kepentingan antara *principal* dan *agent*. Teori ini mengasumsikan bahwa masing-masing individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara *principal* dan *agent*.

Teori Stewardship

(Donaldson, Lex., Davis, 1989) mendefinisikan teori *stewardship* sebagai situasi di mana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Teori *stewardship* mempunyai akar psikologi dan sosiologi yang didesain untuk menjelaskan situasi di mana manajer sebagai *stewards* dan bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik (Dupe, 2018). Teori *stewardship* ini dibangun berdasarkan asumsi filosofi mengenai sifat manusia yaitu dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggungjawab, memiliki integritas, serta dapat berlaku jujur pada pihak lain. Teori ini menggambarkan hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Kesuksesan pada sebuah organisasi dapat dicapai dengan cara maksimalisasi utilitas *principals* dan manajemen (Sukaesih, 2017).

Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Keandalan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Komitmen Organisasi (*Organizational Commitment*) didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana seorang karyawan memihak organisasi tertentu serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tersebut. Komitmen organisasi menurut Ivancevich adalah suatu perasaan mengenal, keterlibatan, dan kesetiaan yang diekspresikan oleh pegawai terhadap organisasi (Eveline, 2017). (Dodopo, 2015) mengatakan komitmen organisasi berkaitan dengan tingkat keterlibatan orang dengan organisasi di mana mereka bekerja dan tertarik untuk tetap tinggal dalam organisasi tersebut serta kesediaan orang untuk meningkatkan diri dan menunjukkan loyalitas pada organisasi karena merasakan dirinya terlibat dalam kegiatan organisasi. Carsten dan Spector dalam (Dodopo, 2015) mengatakan bahwa semakin tinggi komitmen organisasi maka akan berdampak pada karyawan akan tetap tinggal dalam organisasi dan akan selalu meningkatkan kinerjanya. Kinerja karyawan yang tinggi akan menghasilkan laporan keuangan yang andal. Berdasarkan penelitian terdahulu oleh (Dodopo, 2015) dan (Endianto, 2017) menunjukkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

H₁: Komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap keandalan laporan keuangan pemerintah daerah

Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaL Terhadap Keandalan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut (Mardiasmo, 2018), akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting*) digunakan untuk mencatat *revenue* ketika diperoleh (*earned*) dan biaya (*expense*) pada saat terjadi (*incurred*), tanpa memandang apakah kas sudah diterima atau dikeluarkan. Penerapan akuntansi berbasis akrual diperlukan untuk menghasilkan pengukuran kinerja yang lebih baik, serta untuk memfasilitasi manajemen keuangan/aset yang lebih transparan dan akuntabel. Semakin sukses diterapkannya standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual maka pemerintah dapat memiliki tata kelola keuangan yang baik dan menghasilkan laporan keuangan yang andal. Berdasarkan penelitian terdahulu oleh (Kiranayanti, 2016) dan (Husen, 2017) menunjukkan bahwa penerapan basis akrual berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

H₂: Penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual berpengaruh positif terhadap keandalan laporan keuangan pemerintah daerah

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keandalan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Teknologi informasi adalah suatu studi, perancangan, pengembangan, implementasi, dukungan atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, khususnya aplikasi perangkat lunak dan perangkat keras komputer. (Sutabri, 2012) menyatakan bahwa definisi teknologi informasi adalah

suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. Berdasarkan penelitian terdahulu oleh (Nihayah, 2015) dan (Komarasari, 2016) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh secara signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

H3: Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap keandalan laporan keuangan pemerintah daerah

Sistem Pengendalian Internal Memoderasi Hubungan Komitmen Organisasi Terhadap Keandalan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) pengendalian intern didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan tidak berjalannya pengendalian internal, banyak terjadi penyimpangan dan kebocoran yang ditemukan di dalam laporan keuangan, yang menunjukkan bahwa laporan keuangan tersebut belum memenuhi karakteristik/nilai informasi yaitu keterandalan. Dengan berjalannya sistem pengendalian internal yang baik serta didukung dengan komitmen organisasi yang baik pula, maka akan semakin mudah laporan keuangan dibuat dan akan terhindar dari penyimpangan serta kebocoran dalam laporan keuangan, sehingga nilai informasi keterandalan dapat terpenuhi. Berdasarkan penelitian terdahulu oleh (Eristanti, 2019) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal mampu memoderasi komitmen organisasi terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan.

H4: Sistem pengendalian internal memoderasi pengaruh komitmen organisasi terhadap keandalan laporan keuangan pemerintah daerah

Sistem Pengendalian Internal Memoderasi Hubungan Antara Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Terhadap Keandalan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut (Mahmudi, 2016), tujuan dibangunnya sistem pengendalian internal pemerintah adalah salah satunya untuk memberikan jaminan yang memadai bahwa laporan keuangan pemerintah telah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku (Standar Akuntansi Pemerintah/SAP). Dengan adanya penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dan didukung dengan sistem pengendalian internal yang baik akan tercipta laporan keuangan yang andal, efisiensi, dan efektifitas. Berdasarkan penelitian terdahulu oleh (Situmorang, 2016) yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal mampu memoderasi pemahaman standar akuntansi pemerintahan terhadap kemampuan pengelola keuangan SKPD dalam penyusunan laporan keuangan SKPD pada pemerintah Kabupaten Samosir.

H5: Sistem pengendalian internal memoderasi pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual terhadap keandalan laporan keuangan pemerintah daerah

Sistem Pengendalian Internal Memoderasi Hubungan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keandalan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sebuah sistem Pengendalian internal yang baik akan didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi yang baik pula. Pengendalian internal juga bertujuan agar organisasi tetap memanfaatkan teknologi dalam memberikan informasi terkait kegiatan organisasi dikarenakan pengendalian internal sudah terintegrasi dengan teknologi. Pengendalian internal tidak digunakan untuk menghilangkan peluang terjadinya kesalahan dan kecurangan, tetapi dengan adanya pengendalian internal yang baik akan menekan resiko terjadinya hal tersebut sehingga dapat segera diketahui dan diatasi secara cepat agar tidak menimbulkan kerugian. Pengendalian akuntansi yang baik akan menjamin keamanan kekayaan para investor dan kreditur yang ditanamkan dalam perusahaan dan akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya (Karmila, 2014). Dengan adanya pemanfaatan teknologi

informasi serta diperkuat dengan pengendalian internal maka akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Berdasarkan penelitian terdahulu oleh (Sukirman, 2013) yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal mampu memoderasi pemanfaatan teknologi informasi terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Banyumas.

H₆: Sistem pengendalian internal memoderasi pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap keandalan laporan keuangan pemerintah daerah

METODE PENELITIAN

Sumber Data, Populasi, dan Sampel

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang memecahkan masalahnya dengan berdasarkan angka-angka untuk dapat diambil kesimpulannya. Pengambilan datanya menggunakan kuesioner berupa sejumlah pertanyaan yang diberikan kepada responden untuk diisi sesuai keadaannya. Variabel independen dalam penelitian ini adalah komitmen organisasi, penerapan SAP berbasis akrual, dan pemanfaatan teknologi informasi dan variabel dependen yaitu keandalan laporan keuangan pemerintah daerah serta sistem pengendalian internal sebagai variabel moderasi. Pengukuran variabelnya menggunakan skala likert. Populasi dalam penelitian ini adalah para pegawai bagian akuntansi/keuangan pada setiap instansi di 25 SKPD Kabupaten Sleman. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dan analisis regresi moderasi dengan menggunakan bantuan program SPSS versi 16.0.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Tabel 1
Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Komitmen Organisasi	70	21.00	35.00	28.5857	2.79489
Penerapan SAP Berbasis Akrual	70	30.00	50.00	41.0857	4.36967
Pemanfaatan Teknologi Informasi	70	22.00	30.00	25.2857	2.43848
Sistem Pengendalian Internal	70	24.00	40.00	32.2857	3.65602
Keandalan Laporan Keuangan	70	20.00	30.00	24.3429	2.55879

Valid N (listwise) 70

Sumber: Data Primer diolah 2019

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan jumlah sampel (N) adalah 70. Komitmen Organisasi memiliki nilai rata-rata 28,5857 dan standar deviasi 2,79489. Penerapan standar akuntansi pemerintah (SAP) berbasis akrual memiliki nilai rata-rata 41,0857 dan standar deviasi 4,36967. Pemanfaatan teknologi informasi memiliki nilai rata-rata 25,2857 dan standar deviasi 2,43848. Sistem pengendalian internal memiliki nilai rata-rata 32,2857 dan standar deviasi 3,65602. Keandalan laporan keuangan memiliki nilai rata-rata 24,3429 dan standar deviasi 2,55879.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 2
Hasil Uji Normalitas

		<i>Unstandardized Residual</i>
N		70
<i>Normal Parameters^a</i>	<i>Mean</i>	.0000000
	<i>Std. Deviation</i>	1.51564522
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	.079
	<i>Positive</i>	.059
	<i>Negative</i>	-.079
<i>Kolmogorov-Smirnov Z</i>		.664
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		.771

a. Test distribution is Normal.

Sumber: Data Primer diolah 2019

Berdasarkan tabel 2 diperoleh nilai *Kolmogorov-Smirnov* sebesar 0,664 dan nilai signifikansinya adalah sebesar 0,771. Hal tersebut menunjukkan bahwa data tersebut berdistribusi normal karena nilai *Kolmogorov-Smirnov* dan nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05.

Uji Multikolinearitas

Tabel 3
Hasil Uji Multikolinearitas

Model	<i>Collinearity Statistics</i>	
	<i>Tolerance</i>	VIF
1 (Constant)		
Komitmen Organisasi	.557	1.794
Penerapan SAP Berbasis Akrua	.412	2.429
Pemanfaatan Teknologi Informasi	.533	1.874
Sistem Pengendalian Internal	.331	3.021

Dependent Variable: Keandalan Laporan Keuangan

Berdasarkan tabel 3 menunjukkan bahwa semua variabel independen tidak terdapat masalah multikolinearitas. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai *Tolerance* dari semua variabel lebih dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>		Sig.
	B	<i>Std. Error</i>	Beta	t	
1 (Constant)	-.248	1.272		-.195	.846
Komitmen Organisasi	-.056	.050	-.178	-1.113	.270
Penerapan SAP Berbasis Akrua	.000	.038	-.003	-.014	.989
Pemanfaatan Teknologi Informasi	.116	.059	.322	1.964	.054
Sistem Pengendalian Internal	.005	.050	.021	.102	.919

a. *Dependent Variable:* Absres. I

Sumber: Data Primer diolah 2019

Berdasarkan tabel 4 menunjukkan bahwa semua variabel mempunyai nilai signifikansi di atas 0,05. Jadi tidak terdapat variabel independen yang signifikansinya secara statistik mempengaruhi variabel dependen. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut tidak terdapat masalah heteroskedastisitas.

Hasil Pengujian Hipotesis Uji Parsial (Uji t)

Tabel 5
Hasil Uji Parsial (Uji t)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	1.141	2.411			.473	.637
Komitmen Organisasi	.248	.093	.271		2.667	.010
Penerapan SAP Berbasis Akrua	.264	.056	.450		4.716	.000
Pemanfaatan Teknologi Informasi	.208	.108	.199		1.932	.058

a. Dependent Variable: Keandalan Laporan Keuangan

Sumber: Data Primer diolah 2019

Berdasarkan tabel 5 dapat diketahui hasil dari uji t sebagai berikut:

1. Komitmen organisasi menunjukkan besarnya t hitung lebih besar dari t tabel ($2,667 > 1,996$) dan tingkat signifikansinya kurang dari 0,05 ($0,010 < 0,05$). Hal ini berarti bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keandalan laporan keuangan, sehingga perumusan hipotesis 1 yaitu komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap keandalan laporan keuangan terdukung.
2. Penerapan SAP berbasis akrual menunjukkan besarnya t hitung lebih besar dari t tabel ($4,716 > 1,996$) dan tingkat signifikansinya kurang dari 0,05 ($0,000 < 0,05$). Hal ini berarti bahwa penerapan SAP berbasis akrual berpengaruh positif dan signifikan terhadap keandalan laporan keuangan, sehingga perumusan hipotesis 2 yaitu penerapan SAP berbasis akrual berpengaruh positif terhadap keandalan laporan keuangan terdukung.
3. Pemanfaatan teknologi informasi besarnya t hitung lebih kecil dari t tabel ($1,932 < 1,996$) dan tingkat signifikansinya lebih dari 0,05 ($0,058 > 0,05$). Hal ini berarti bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap keandalan laporan keuangan, sehingga perumusan hipotesis 3 yaitu pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap keandalan laporan keuangan tidak terdukung.

Uji Simultan (Uji F)

Tabel 6
Hasil Uji Simultan (Uji F)

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	293.266	4	73.316	30.066	.000 ^a
Residual	158.505	65	2.439		
Total	451.771	69			

Predictors: (Constant), Sistem Pengendalian Internal, Komitmen Organisasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Penerapan SAP Berbasis Akrua

Dependent Variable: Keandalan Laporan Keuangan

Sumber: Data Primer diolah 2019

Berdasarkan tabel 6 dapat diketahui hasil dari uji F menunjukkan bahwa F hitung 32,567 lebih besar dari F tabel (32,567 > 3,13) dan tingkat signifikansinya kurang dari 0,05 (0,000 < 0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel independen, yaitu komitmen organisasi, penerapan SAP berbasis akrual, dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh secara simultan (bersama-sama) terhadap variabel dependen yaitu keandalan laporan keuangan.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 7
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.773 ^a	.597	.578	1.66125

Predictors: (Constant), Pemanfaatan Teknologi Informasi, Penerapan SAP Berbasis Akrual, Komitmen Organisasi

Dependent Variable: Keandalan Laporan Keuangan

Sumber: Data Primer diolah 2019

Berdasarkan tabel 7 diperoleh nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,578 atau 57,8%, hal ini berarti bahwa besarnya pengaruh yang diberikan oleh variabel independen yaitu komitmen organisasi, penerapan SAP berbasis akrual, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap keandalan laporan keuangan adalah sebesar 57,8%. Sedangkan sisanya sebesar 42,2% dipengaruhi oleh faktor lain di luar variabel dalam penelitian ini.

Hasil Uji Moderasi
Uji Parsial (Uji t)

Tabel 8
Hasil Uji Parsial (Uji t) Moderasi

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8.805	3.715		2.370	.021
	Komitmen Organisasi	-1.940	.701	-2.119	-2.768	.007
	Penerapan SAP Berbasis Akrual	.496	.375	.848	1.322	.191
	Pemanfaatan Teknologi Informasi	1.681	.782	1.602	2.150	.035
	Komitmen Organisasi*Sistem Pengendalian Internal	.063	.021	4.396	3.064	.003
	Penerapan SAP Berbasis Akrual*Sistem Pengendalian Internal	-.009	.011	-1.011	-.849	.399
	Pemanfaatan Teknologi Informasi*Sistem Pengendalian Internal	-.046	.023	-2.902	-1.994	.051

a. Dependent Variable: Keandalan Laporan Keuangan

Sumber: Data Primer diolah 2019

Berdasarkan tabel 8 dapat diketahui hasil dari uji t sebagai berikut:

1. Komitmen organisasi dengan sistem pengendalian internal sebagai variabel moderasi menunjukkan t hitung lebih besar dari t tabel (3.064 > 1.996) dan tingkat signifikansinya kurang

dari 0,05 ($0,003 < 0,05$). Hal ini berarti bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keandalan laporan keuangan dan sistem pengendalian internal memoderasi komitmen organisasi terhadap keandalan laporan keuangan, sehingga perumusan hipotesis 4 yaitu sistem pengendalian internal memoderasi pengaruh komitmen organisasi terhadap keandalan laporan keuangan terdukung.

2. Penerapan SAP berbasis akrual dengan sistem pengendalian internal sebagai variabel moderasi menunjukkan t hitung lebih kecil dari t tabel ($-0,849 < 1,996$) dan tingkat signifikansinya lebih dari 0,05 ($0,399 > 0,05$). Hal ini berarti bahwa penerapan SAP berbasis akrual tidak berpengaruh terhadap keandalan laporan keuangan dan sistem pengendalian internal tidak memoderasi penerapan SAP berbasis akrual terhadap keandalan laporan keuangan, sehingga perumusan hipotesis 5 yaitu sistem pengendalian internal memoderasi pengaruh penerapan SAP berbasis akrual terhadap keandalan laporan keuangan tidak terdukung.
3. Pemanfaatan teknologi informasi dengan sistem pengendalian internal sebagai variabel moderasi menunjukkan t hitung lebih kecil dari t tabel ($-1,994 < 1,996$) dan tingkat signifikansinya lebih dari 0,05 ($0,051 > 0,05$). Hal ini berarti bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap keandalan laporan keuangan dan sistem pengendalian internal tidak memoderasi pemanfaatan teknologi informasi terhadap keandalan laporan keuangan, sehingga perumusan hipotesis 6 yaitu sistem pengendalian internal memoderasi pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap keandalan laporan keuangan tidak terdukung.

Uji Simultan (Uji F)

Tabel 9
Hasil Uji Simultan (Uji F) Moderasi

Model		Sum of Square	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	315.552	6	52.592	24.323	.000 ^a
	Residual	136.219	63	2.162		
	Total	451.771	69			

a. Predictors: (Constant), Pemanfaatan Teknologi Informasi*Sistem Pengendalian Internal, Komitmen Organisasi, Penerapan SAP Berbasis Akrual, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Penerapan SAP Berbasis Akrual*Sistem Pengendalian Internal, Komitmen Organisasi*Sistem Pengendalian Internal

b. Dependent Variable: Keandalan Laporan Keuangan

Sumber: Data Primer diolah 2019

Berdasarkan tabel 9 dapat diketahui hasil dari uji F menunjukkan bahwa F hitung 24,323 lebih besar dari F tabel ($24,323 > 3,13$) dan tingkat signifikansinya kurang dari 0,05 ($0,000 < 0,05$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel independen, yaitu komitmen organisasi, penerapan SAP berbasis akrual, dan pemanfaatan teknologi informasi dengan variabel moderasi yaitu sistem pengendalian internal berpengaruh secara simultan (bersama-sama) terhadap variabel dependen keandalan laporan keuangan.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 10
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²) Moderasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.836 ^a	.698	.670	1.47045

a. Predictors: (Constant), Pemanfaatan Teknologi Informasi*Sistem Pengendalian Internal, Komitmen Organisasi, Penerapan SAP Berbasis Akrual, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Penerapan SAP Berbasis Akrual*Sistem Pengendalian Internal, Komitmen Organisasi*Sistem Pengendalian Internal

b. Dependent Variable: Keandalan Laporan Keuangan

Sumber: Data Primer diolah 2019

Berdasarkan tabel 10 diperoleh nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,670 atau 67%, hal ini berarti

bahwa besarnya pengaruh yang diberikan oleh variabel independen yaitu komitmen organisasi, penerapan SAP berbasis akrual, dan pemanfaatan teknologi informasi dengan sistem pengendalian internal sebagai variabel moderasi terhadap keandalan laporan keuangan adalah sebesar 67%. Sedangkan sisanya sebesar 33% dipengaruhi oleh faktor lain di luar variabel dalam penelitian ini.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pengujian data yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keandalan laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen organisasi memiliki nilai positif yang berguna bagi para pegawai dalam membuat atau menyajikan laporan keuangan. Semakin tinggi tingkat komitmen organisasi yang dimiliki oleh para pegawai bagian akuntansi/keuangan akan tinggi pula tingkat kepatuhan dalam penyajian laporan keuangan sehingga akan meningkatkan tingkat keandalan laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan.
2. Penerapan SAP berbasis akrual berpengaruh positif dan signifikan terhadap keandalan laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil ini menggambarkan bahwa di SKPD Kabupaten Sleman keberadaan penerapan SAP berbasis akrual memiliki nilai yang positif yang dapat meningkatkan tingkat keandalan laporan keuangan. Semakin sukses diterapkannya SAP berbasis akrual maka pemerintah dapat memiliki tata kelola keuangan yang baik dan akan menghasilkan laporan keuangan yang baik dan andal tentunya.
3. Pemanfaatan teknologi tidak berpengaruh terhadap keandalan laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini disebabkan karena teknologi informasi belum dimanfaatkan secara maksimal, sehingga perlu ditingkatkan lagi pemanfaatan teknologi informasi agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih andal dan berkualitas.
4. Sistem pengendalian internal memoderasi hubungan komitmen organisasi terhadap keandalan laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil ini menggambarkan bahwa keberadaan komitmen organisasi memiliki nilai yang positif dan ditambah dengan sistem pengendalian internal yang efektif yang dapat meningkatkan tingkat keandalan laporan keuangan. Semakin tinggi tingkat komitmen organisasi serta didukung oleh sistem pengendalian internal yang baik maka laporan keuangan akan semakin mudah dibuat dan akan menghasilkan laporan keuangan yang baik dan andal tentunya.
5. Sistem pengendalian internal tidak memoderasi hubungan penerapan SAP berbasis akrual terhadap keandalan laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan penerapan SAP berbasis akrual belum maksimal dilakukan dan sistem pengendalian internal belum efektif diterapkan. Dengan demikian, perlu ditingkatkan dan dimaksimalkan lagi penerapan SAP berbasis akrual dengan didukung oleh sistem pengendalian internal yang efektif pula agar laporan keuangan lebih andal dan berkualitas.
6. Sistem pengendalian internal tidak memoderasi hubungan pemanfaatan teknologi informasi terhadap keandalan laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi informasi belum dimanfaatkan secara maksimal dan sistem pengendalian internal belum efektif diterapkan. Dengan demikian, perlu ditingkatkan dan lebih dimanfaatkan lagi pemanfaatan teknologi informasi dengan didukung oleh sistem pengendalian internal yang efektif pula agar laporan keuangan lebih andal dan berkualitas.

Saran

Saran yang diberikan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi instansi pemerintah daerah, agar lebih memaksimalkan dan mengoptimalkan lagi tingkat komitmen organisasi, penerapan SAP berbasis akrual dan pemanfaatan teknologi informasi, serta sistem pengendalian internal sehingga penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah dapat menghasilkan hasil yang baik, andal, dan berkualitas.
2. Bagi penelitian selanjutnya, agar menambah variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi keandalan laporan keuangan pemerintah daerah seperti kompetensi sumber daya manusia, pengawasan keuangan daerah, dan sistem informasi akuntansi.

3. Penelitian selanjutnya agar memperlebar jumlah sampel dan melengkapi pengumpulan data dengan metode lain seperti metode wawancara agar informasi atau data yang diperoleh lebih lengkap dan akurat.

REFERENSI

- Baiq Dwi Apryana Eristanti, Hermanto, I. N. N. A. P. (2019). Sistem Pengendalian *Intern* Memoderasi Pengaruh Komitmen Organisasi, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Pada Ketepatanwaktu Pelaporan Keuangan. *Universitas Mataram*.
- Dodopo, Y., J, S. J., & Tinangon, J. j. (2015). Pengaruh Komitmen Organisasi, Pengendalian *Intern* Akuntansi, Peran Internal Audit, Pendidikan, dan Kualitas Pelatihan Terhadap Keterandalan Laporan Keuangan Pada SKPD Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara. *Universitas Sam Ratulangi*.
- Donaldson, Lex., Davis, J. H. (1989). *Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and reholder Returns*. *Journal of Management*.
- Dupe, Apriani Erna, S. A. (2018). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Penerapan SAP Berbasis AkruaI Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dengan Sistem Pengendalian *Intern* Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Klaten). *Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa*.
- Endianto, M., Herawati, N. T., & Kurniawan, P. S. K. (2017). Pengaruh Efektivitas Standar Akuntansi Pemerintah, Peran Internal Audit dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah Se-Kabupaten Bangli). *Universitas Pendidikan Ganesha*.
- Eveline, F. (2017). Pengaruh SAP Berbasis AkruaI, Sistem Informasi Akuntansi, Kualitas SDM, Pengendalian Internal dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- Harianmerapi.com. (2018). Pertahankan WTP 6 Kali-BPK Mulai Periksa LKPD Sleman Tahun 2017.
- Husen Idham, S. A. (2017). Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan SAP Berbasis AkruaI, SIMDA, dan Sistem Pengendalian *Intern* Terhadap Relevansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kantor Walikota Yogyakarta). *Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa*.
- Jensen, and W. H. M. (1976). *Managerial Behavior, Agency Cost And Ownership Structure*. *Journal of Financial Economics*.
- Karmila, A. R., & Tanjung, E. D. (2014). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian *Intern* Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Provinsi Riau). *Universitas Riau*.
- Kiranayanti, Ida Ayu Enny, N. M. A. E. (2016). Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian *Intern*, Pemahaman Basis AkruaI terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *Universitas Udayana*.
- Komarasari, W. (2016). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian *Intern* Akuntansi terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Daerah (Pada SKPD Kabupaten Bantul Bagian Akuntansi dan Keuangan).
- Latifah, Asyiyhatul. (2017). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus pada SKPD Bantul). *Universitas PGRI Yogyakarta*.
- M Ali Fikri Biana Adha Inapty, R. S. P. M. (2016). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Aparatur dan Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Dengan Sistem Pengendalian *Intern* Sebagai Variabel *Moderating* (Studi Empiris pada SKPD di Pemprov NTB). *Universitas Mataram*.
- Mahmudi. (2016). *Akuntansi Sektor Publik*. *UII Press Yogyakarta*.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*.
- Merlyn C. T. Kalumata, Ventje Ilat, J. D. L. W. (2014). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, Reviu Laporan Keuangan dan Sistem Pengendalian Internal

Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

Nihayah, A. (2015). Pengaruh Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian Internal Terhadap Ketepatanwaktuan dan Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada DPPKAD Eks Karesidenan Pati). *Universitas Muhammadiyah Surakarta*.

Pratama, A. (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Moderasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas*.

Republik, Indonesia. (2008). *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah*.

Republik, Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.

Situmorang, J. (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemampuan Pengelola Keuangan SKPD Dalam Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan Dengan Pengawasan Internal Sebagai Variabel Pemoderasi Pada Pemerintah Kabupaten Samosir. *Universitas Sumatera Utara*.

Sukaesih, S. (2017). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian *Intern* Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sleman).

Sukirman, Havid Sularso, E. S. N. (2013). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Dengan Pengendalian *Intern* Akuntansi Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas). *Universitas Jenderal Sudirman*.

Sutabri, T. (2012). *Analisis Sistem Informasi*.